



**EVALUASI HASIL
RENJA PERANGKAT
DAERAH**

TRIWULAN II TAHUN 2023

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESIR
SELATAN**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dilakukan terhadap 3 Program dan 10 Kegiatan dengan 26 Sub Kegiatan, dengan adanya keterbatasan anggaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dianggarkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan ini juga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2023. Disadari bahwa laporan ini mempunyai kelemahan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran semua pihak sebagai bahan perbaikan kedepannya.

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 3 Juli 2023

Inspektur,


RUSDYANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19641112 199203 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Dasar Hukum Penyusunan 3

 1.2 Maksud dan Tujuan 5

 1.3 Metodologi 6

BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA, PENYERAPAN DANA DAN KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD..... 7

 2.1 Capaian Target Kinerja, Penyerapan Dana..... 7

 2.2 Rencana Pelaksanaan Program Kegiatan Wajib Inspektorat Daerah...7

 2.3 Realisasi dan Kendala Pelaksanaan Program Kegiatan..... 9

BAB III KESIMPULAN 11

 3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD
 Triwulan I Tahun 2023 11

LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2023.





BAB I PENDAHULUAN

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Landasan konstitusional pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dan pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2024.



1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.



1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud.

Maksud dari Evaluasi RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi :

1. Pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2022.
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.2.2. Tujuan.

1. Memberikan gambaran proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga Triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 berdasarkan realisasi anggaran.
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga triwulan II sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai sistem perbaikan terus menerus kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.



1.3 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91 \% \leq 100 \%$
2	Tinggi	T	$76 \% \leq 90 \%$
3	Sedang	S	$66 \% \leq 75 \%$
4	Rendah	R	$51 \% \leq 65 \%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50 \%$

Sumber : Permendagri 86/2017



BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA, PENYERAPAN DANA DAN KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD

2.1 Capaian Target Kinerja, Penyerapan Dana Program

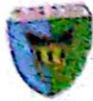
Urusan dalam pencapaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas Urusan Wajib pengawasan dan Urusan Penunjang.

Fungsi Pengawasan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui 3 Program, 10 Kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan anggaran awal tahun 2023 sebesar Rp 8.820.403.824,- dan sampai dengan akhir Triwulan II tanggal 30 Juni 2023, telah terealisasi keuangan sebesar Rp 4.433.045.387,- atau 50,26% dengan capaian kinerja RPJMD \geq 66% (Sedang). Sesuai dengan daftar terlampir.

2.2 Rencana Pelaksanaan Program Kegiatan Wajib Inspektorat Daerah

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Merupakan program utama dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ketersediaan anggaran pada program ini sangat menentukan kelancaran tugas dalam pengawasan pelaksanaan urusan wajib Inspektorat Daerah secara berkala. Anggaran yang tersedia saat ini cukup untuk memfasilitasi



Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Pelaksanaan tugas Pengawasan Internal oleh APIP Inspektorat Daerah dilakukan dalam 12 kali penugasan (12 bulan kerja) yang terdiri dari kegiatan Audit Ketaatan pada 172 objek pemeriksaan (obrik), Audit Kinerja pada 4 perangkat Daerah, Reviu laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Monitoring, Evaluasi dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada obrik yang LHP nya telah terbit dan hasil temuannya belum ditindak lanjuti secara tuntas oleh masing-masing obrik. Sedangkan Pengawasan dengan tujuan tertentu terdiri dari pemeriksaan khusus persediaan sebanyak 41 Perangkat Daerah, Pemeriksaan Kasus/Khusus sebanyak 6 kali penugasan, Pemeriksaan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada akhir tahun anggaran pada 41 Perangkat Daerah dan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah oleh Tim TPKND.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Merupakan program pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, antara lain : Pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, penilaian Kapabilitas APIP, Reformasi Birokrasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Verifikasi dan Penegakan Integritas. Dalam pelaksanaan program kegiatan ini, setiap perangkat daerah perlu mendapatkan bimbingan teknis/pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat terkait aturan, tatacara dan



tahapan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan tugas tersebut diatas.

2.3 Realisasi dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Kegiatan

Pada triwulan II ini realisasi pelaksanaan Program Kegiatan untuk fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Pengawasan

Pada triwulan II Tahun 2023, Program penyelenggaran pengawasan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang ada dengan realisasi sebagai berikut :

- Audit ketaatan telah terlaksana pada 114 obrik yang terdiri dari 89 Nagari, 17 Sekolah dan 8 Puskesmas.
- Audit Kinerja rencananya akan dilaksanakan pada triwulan ke-3.
- Reviu laporan kinerja (reviu yang telah dilaksanakan adalah Evaluasi laporan AKIP (Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Pemda) pada 41 PD dan Reviu LPPD. Sedangkan Reviu yang akan datang Reviu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2023, Manajemen ASN, Tata Kelola Perizinan, Tata Kelola Pajak, Reviu Tata Kelola Aset.
- Reviu Laporan Keuangan (reviu yang telah dilaksanakan adalah Reviu KUA-PPAS, Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Triwulan I dan II, Reviu DAK Tahun 2022 Tahap III dan Reviu DAK Kontrak Tahun 2023, Reviu Pelayanan Publik (Dana Tagging), Reviu LKPD dan Reviu Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Pesisir



Selatan Tahun 2024. Sedangkan Reviu yang masih dalam proses adalah Reviu DAK Tahun 2023 Tahap I dan II pada 9 Sub Bidang di perangkat daerah, Reviu Perubahan RKPD Tahun 2023, Reviu ASB, Reviu RKA dan dana BOK dan Reviu Tata Kelola Dana Desa.

- Monitoring Tindak Lanjut Hasil temuan APIP Sudah terlaksana sebanyak 11 kali penugasan dalam 6 bulan kerja, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan APIP pada Nagari sebanyak 4 Kali, Monitoring *Stock Opname Vaksin Covid-19* dan Logistik Penunjang sebanyak 6 kali penugasan.
- Pengawasan dengan tujuan tertentu yang sudah terlaksana adalah Pemeriksaan Persediaan awal Tahun 2023 pada 41 PD, Pemeriksaan khusus pada perangkat daerah (Dinas Pertanian), Pemeriksaan kasus pada 3 nagari (Kec. Lengayang, kec. Lunang dan Kec. Koto XI Tarusan) dengan 6 kali penugasan.

2. Program kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Untuk Program kegiatan Pendampingan dan Asistensi berupa kegiatan Pendampingan Penilaian mandiri SPIP terintegrasi yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, Penilaian Kapabilitas APIP, Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi penilaian mandiri SPIP dan Zona Integritas. Untuk Penilaian Kapabilitas APIP, Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri SPIP pada saat ini sedang berlangsung. Sedang untuk Pencanaan Zona Integritas (ZI) masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia, maka pencanaan ZI masih belum bisa dilakukan.



BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan II Tahun 2023

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II, Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan II Tahun 2023

No	Urusan	Anggaran DPA 2023	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2023	Capaian Kinerja RPJMD		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
1	Penyelenggaraan Pengawasan	1,583,777,087	730,845,292	71,03	88,19	46,15	ST
2	Pendampingan dan asistensi	57,284,750	9,825,950	21,88	41,32	17,15	SR
Urusan Penunjang							
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	7,179,341,987	3,692,374,145	68,61	86,64	51,43	S
	Total	8,820,403,824	4,433,045,387	68,19	65,50	50,26	S

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah Sedang (S).

Dari hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

1. Masih belum seimbang jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan



rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).
4. Keterbatasan Anggaran yang tersedia untuk peningkatan kompetensi APIP Kabupaten Pesisir Selatan.

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Periode Pelaksanaan: Trilwulan II Tahun 2023**

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/Output	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2023	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Saat ini (2023) yang Di realisasi	Realisasi Kinerja Pada Trilwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD di Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD di Tahun 2023 (%)	SKPD Penerimaan Jasa							
								I		II						K	Rp.	K	Rp.			
								K	Rp.	K	Rp.											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
		01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
		01	INSPEKTORAT DAERAH		10,574,400,000	8,730,893,280	8,820,403,824	1,802,881,058	2,526,820,079			4,433,046,387	13,163,938,877	95.98	88.78			INSPEKTORAT				
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		8,824,400,000	7,088,068,164	7,178,341,987	1,468,833,808	2,236,640,537			3,892,374,148	10,788,490,288	87.84	88.81			INSPEKTORAT				
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80,000,000		18,978,466	217,750	2	453,280		871,000	2.50	671,000	81.87	1.30		INSPEKTORAT				
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	30,000,000	0	6	18,978,466	3	217,750	2	453,280		5	871,000	6	671,000	83.33	2.24	INSPEKTORAT	
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7,800,000,000	6,340,196,468	6,388,103,828	1,178,820,763	283	2,078,906,327			3,258,877,950	9,559,022,548	78.34	88.85		INSPEKTORAT				
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	626 Orang/bulan	7,500,000,000	805	6,249,788,103	741	6,327,403,828	172	1,170,020,763	280	2,084,056,327		462	3,234,077,050	1,287	9,483,969,193	77.68	88.97	INSPEKTORAT
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		115,000,000	0	48,564,797		50,000,000				50,000,000		58,554,797	200.00					INSPEKTORAT	
		02	Pengadaan Pakaran Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaran Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30,000,000	0															INSPEKTORAT
		03	Pendidikan dan Peralatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Peralatan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	35,000,000	0															INSPEKTORAT
		08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	50,000,000	4	48,564,797	3	50,000,000	10	50,000,000		10	50,000,000	14	98,564,797	200.00	100.00			INSPEKTORAT
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		341,400,000	288,222,582	347,416,036	118,562,734	13	76,757,352			195,320,088	484,542,868	88.10	141.80			INSPEKTORAT			
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 paket	6,000,000	12	8,288,500	12	5,374,398	12	5,374,398		12	5,374,398	24	13,662,898	100.00	95.62			INSPEKTORAT
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	2	12,758,810	4	43,375,500	4	37,581,500		4	37,581,500	8	50,340,310	150.00	80.21			INSPEKTORAT
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40,000,000	12	40,537,530	12	34,025,274	6	21,526,000	1	3,009,500		7	24,535,500	18	65,073,030	79.17	80.80	INSPEKTORAT
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,000,000	12	17,342,490	12	17,240,984			4	5,735,900		4	5,735,900	18	23,078,390	66.67	81.80	INSPEKTORAT
		06	Penyediaan Bahan Baku dan Perakur: Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakur: Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,400,000	12	5,400,000	12	5,400,000	3	1,350,000	3	900,000		6	2,250,000	18	7,650,000	75.00	70.83	INSPEKTORAT
		08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	20,000,000	12	21,800,000	12	18,250,000	3	3,800,000	2	1,825,000		5	5,775,000	17	27,375,000	70.83	65.81	INSPEKTORAT
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	12	183,295,292	12	222,748,909	3	48,680,838	9	68,186,882		6	114,067,738	18	297,363,040	75.00	77.56	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2022	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Diwujudkan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Diwujudkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)	SKPD Penanggung Jawab								
								I	II	III	IV												
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30,000,000		31,322,840	31,322,840				31,322,840		96.57	INSPEKTORAT								
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	20,000,000	0	30	18,975,000	30	18,975,000	30	30	100.00	INSPEKTORAT								
		06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15,000,000	0	2	12,347,840	2	12,347,840	2	2	100.00	INSPEKTORAT								
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		178,000,000	145,867,415	142,867,379	34,436,321	6	34,617,508		69,663,828	214,921,244	79.00	120.74	INSPEKTORAT							
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28,000,000	12	24,831,445	12	26,520,000	3	6,917,921	3	7,312,708			6	14,230,629	18	38,052,074	75.00	73.54	INSPEKTORAT
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150,000,000	12	121,035,970	12	118,067,379	3	27,518,400	3	27,304,800			6	54,823,200	18	175,859,170	75.00	64.88	INSPEKTORAT
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		295,000,000	264,205,902	190,933,650	41,373,400		45,806,100		87,179,500		351,385,402	66.72	119.11	INSPEKTORAT						
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	210,000,000	13	189,294,902	13	176,083,650	3	33,923,400	4	43,356,100			7	77,279,500	20	258,574,402	83.33	66.78	INSPEKTORAT
		05	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	25,000,000	26	16,600,000	26	14,850,000	3	7,450,000	1	2,450,000			4	9,900,000	30	26,509,000	83.83	63.70	INSPEKTORAT
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	60,000,000	1	58,311,000						1	58,311,000	90.00	46.29						INSPEKTORAT
		4.191.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1,850,000,000	1,522,337,636	1,583,777,087	447,147,450		283,697,842				730,845,292		2,253,182,928	88.19	71.89					INSPEKTORAT
		2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1,330,000,000	1,215,857,026	1,334,823,806	348,978,100		237,904,142				584,882,242		1,800,738,268	113.43	70.73					INSPEKTORAT
		01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	65,000,000	4	56,139,500	4	48,586,761				4	56,139,500	50.00	46.34						INSPEKTORAT
		02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	170 Laporan	580,000,000	144	691,699,240	176	603,944,044	63	171,727,800	51	114,007,200			114	285,736,000	258	977,434,240	82.17	76.86	INSPEKTORAT
		03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	9 Laporan	80,000,000	8	92,705,060	48	42,337,529	41	24,924,550	3	150,000			44	25,074,550	52	117,779,610	305.88	68.20	INSPEKTORAT
		04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	7 Laporan	155,000,000	6	19,544,180	168	188,617,265	3	25,728,000	29	51,398,850			32	77,128,850	38	96,671,030	292.31	55.38	INSPEKTORAT
		05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	10 Laporan	25,000,000	0																INSPEKTORAT
		06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	25,000,000	0																INSPEKTORAT
		07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36 Dokumen	400,000,000	30	355,769,946	36	451,338,207	3	124,597,750	9	72,348,092			12	186,945,842	42	552,714,888	63.64	73.13	INSPEKTORAT
			Melakukan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan		320,000,000	180	306,480,610	248,963,281	100,168,360	46,793,709				155,789,000	209	452,443,690	62.96	72.22				INSPEKTORAT	

No	Saaran	Kode Rekening	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2023	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Direalisasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direalisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)	SKPD Penanggung Jawab		
								I	II	III	IV						
			01 Perancangan Penyediaan Kerugian Negara/daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kerugian Negara/daerah yang Ditangani	1 Laporan	68,000,000	1 48,180,200	1 41,660,400			14,764,800		14,764,800	1 63,624,900	50,00	64,98	INSPEKTORAT
			02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	115 Laporan	252,000,000	159 257,320,410	97 207,292,861	44	100,168,350	5 31,026,100	49	131,198,450	208 288,518,660	75,91	78,28	INSPEKTORAT
		6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			396,000,000	120,689,500	87,284,750			6,981,700		9,828,950	12 78,075,700	29,59	18,68	INSPEKTORAT
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			40,000,000	0										INSPEKTORAT
			01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	20,000,000	0										INSPEKTORAT
			02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	20,000,000	0										INSPEKTORAT
		2.02	Pendampingan dan Asistensi			280,000,000	26 89,348,750	41 87,284,750	3,244,250	11 5,981,700	-10,50	9,828,950	12 78,075,700	41,32	21,88	INSPEKTORAT	
			01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	26 Perangkat Daerah	70,000,000	26 00,248,750	41 27,059,800			10 5,087,800	10	5,087,800	36 65,337,500	138,48	60,16	INSPEKTORAT
			02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 Perangkat Daerah	70,000,000	0	41 30,224,950	3,244,250	11 1,493,900	11	4,738,150	11 4,738,150	28,83	8,77	INSPEKTORAT	
			03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	60,000,000	0										
			04 Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	5 Perangkat Daerah	60,000,000	0										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA												65,50	68,19				
PERINGKAT KINERJA												R	6				
Realisasi Anggaran Seluruh Program												8,820,403,824					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												66,41	74,66				
PERINGKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												67	67				

Faktor pendukung keberhasilan kinerja:
 Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 Tindakan lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya:
 Tindakan lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

